

FAKTOR, KRITERIA DAN ASPEK: TINJAUAN KEWARGANEGARAAN

Khodadad Azizi

IAIN SAS Bangka Belitung, Indonesia
khdddazizi@gmail.com

Siti Rohaya

IAIN SAS Bangka Belitung, Indonesia
sitipkp017@gmail.com

Aurha Khairiza

IAIN SAS Bangka Belitung, Indonesia
aurhakhrz@gmail.com

Gustin

IAIN SAS Bangka Belitung, Indonesia
gustin@iainsasbabel.ac.id

DOI:		
Received: 20-10-2022	Revised: 21-11-2022	Approved: 30-11-2022

Abstract:

Citizenship Education can be stated as an effort in the educational process because it has broad aspects related to political or governmental issues in the development of citizens. In strengthening good planning in citizenship, of course, it must be supported by various things, both in terms of criteria, aspects and also the factors that influence it. From the curriculum side, the curriculum must also be active in supporting the achievement of civic competence, which means that the curriculum can meet changes in line with the times, science and technology. In addition, there needs to be a good approach in the implementation process. The approach can be done in a scientific way. Various aspects that exist in the values of Pancasila must be embodied with norms and ethics. These norms are used as guidelines for good behavior in society. Moral is also an academic and non-academic education, which means what good behavior is then applied to life in society. In citizenship education, there are two necessary factors. Namely, contextual factors (internal) and structural factors (external). Contextual factors related to material concepts. In terms of structural factors which are related to institutions or institutions where the educational process is carried out. Apart from that, it is also to find out the extent to which the quality and quantity of implementing citizenship in a country can be seen from the attainment of the criteria for citizenship education itself. The criteria can be seen in terms of the minimum criteria and also the maximum criteria in achieving citizenship education in a country.

Keywords: *factors, criteria, aspects, citizenship*

Abstrak:

Pendidikan Kewarganegaraan dapat dinyatakan sebagai upaya dalam proses pendidikan karena memiliki aspek-aspek yang luas berhubungan dengan masalah politik ataupun pemerintahan dalam pengembangan warga negara. Dalam penguatan perencanaan yang baik dalam kewarganegaraan tentunya harus didukung oleh berbagai hal baik itu dari sisi kriteria, aspek dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari sisi kurikulum dimana kurikulum juga harus bersifat aktif dalam mendukung tercapainya kompetensi kewarganegaraan, yang artinya kurikulum dapat menyongsong perubahan yang selaras dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang baik dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan dapat dilakukan dengan cara saintifik. Beragam aspek yang ada di dalam nilai Pancasila harus

di wujudkan dengan norma-norma dan etika. Norma-norma tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk bersikap yang baik dalam bermasyarakat. Moral juga merupakan pendidikan akademik dan non-akademik, yang artinya adalah seperti apa perilaku yang baik lalu di terapkan ke kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat dua faktor yang diperlukan. Yaitu, faktor kontekstual (internal) dan faktor struktural (eksternal). Faktor kontekstual berkaitan dengan konsep-konsep materi. Dalam hal factor structural dimana berkaitan dengan institusi atau Lembaga tempat melaksanakan proses Pendidikan. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan kuantitas pelaksanaan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat dilihat dari pencapaian kriteria-kriteria Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Kriteria dapat dilihat dari sisi kriteria minimal dan juga kriteria maksimal dalam pencapaian Pendidikan kewarganegaraan suatu negara.

Kata Kunci: faktor, kriteria, aspek, kewarganegaraan

A. PENDAHULUAN

Civic education atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bentuk dari disiplin ilmu atau merupakan pendidikan yang mana dalam demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik. *Civic education* juga dapat dinyatakan upaya dalam proses pendidikan Karena memiliki aspek-aspek yang luas berhubungan dengan masalah politik ataupun pemerintahan dalam pengembangan warga negara. Dalam penguatan perencanaan yang baik dalam kewarganegaraan tentunya harus didukung oleh berbagai hal baik itu dari sisi kriteria, aspek dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dari sisi kurikulum dimana kurikulum juga harus bersifat aktif dalam mendukung tercapainya kompetensi kewarganegaraan, yang artinya kurikulum dapat menyongsong perubahan yang selaras dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. oleh karena itu para ekspansi kurikulum harus mempunyai wawasan pengetahuan yang luas. Dalam konsep dasar kurikulum yang di pahami secara metode menjadi pegangan dalam penjabaran dalam satuan pendidikan.¹

Selain itu, perlu adanya pendekatan yang baik dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan dapat di lakukan dengan cara saintifik yaitu

¹ Regia Ade Darman, M.Pd., *Telaah Kurikulum*, (Jakarta, Guepedia, 2021), Hlm.7-21.

sebelum akan memulai pembelajaran para peserta didik di minta untuk mengamati gambar- gambar pahlawan, lalu para peserta didik di harapkan bertanya dengan apa yang telah mereka amati, lalu mengidentifikasi secara kelompok, mencari informasi yang ada dalam buku teks ataupun informasi lainnya, lalu para peserta didik di harapkan dapat menjelaskan apa yang telah mereka dapatkan.²

Dalam pengembangan peserta didik di harapkan pengajar harus memiliki sikap bela negara yang mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Karena kewarganegaraan mencakup banyak aspek dalam nilai dan khas dari masyarakat Indonesia. Seorang pengajar harus menanamkan nilai karakter bela negara kepada peserta didik agar meniru dari apa yang telah di tanamkan oleh pengajar, karena pengajar merupakan pelaku utama dalam pengembangan peserta didik dan sumber inspirasi bagi peserta didik. Jika pengajar sendiri tidak memiliki karakter bela negara bagaimana para peserta didik dapat meniru tentang karakter bela negara. Maka hal pertama yang harus di lakukan adalah memiliki kepribadian bela negara. Para pengajar juga di harapkan dapat memahami secara spesifik bagaimana pola pembelajaran kewarganegaraan dan bagaimana aspek-aspeknya dalam pendidikan. Jika para pengajar dapat memahami hal tersebut peserta didik akan memahami dan meniru bagaimana nilai-nilai karakter bela negara yang telah mereka pelajari dan dipahami di sekolah, Dan dapat mereka praktekan dan kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan sekolah atau di universitas peserta didik.³ Dalam penilaian kewarganegaraan memiliki banyak orientasi yaitu bagaimana cara pendidik dapat mengorientasikan hal tersebut. Karena di era zaman ini nilai-nilai kewarganegaraan hanyalah sebatas ucapan bagi peserta didik.

² Maulana Arafat Lubis, M. Pd., *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) DI SD/MI: Peluang Dan Tantangan di Era Industri 4.0*, (Jakarta, KENCANA, 2020), Hlm, 103

³ Fauzi, Fadil yudia, Arianto, Ismail, Solihatin, Etin, *Pera Guru Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik*, Jurnal PPKN UNJ Online, Voumel 1, Nomor 2, 2013, Hlm, 4.

Perilaku melanggar norma-norma dan moral yang rendah merupakan contoh bagaimana perilaku anak di zaman sekarang.⁴

Beragam aspek yang ada di dalam nilai Pancasila harus di wujudkan dengan norma-norma dan etika. Norma-norma tersebut di jadikan sebagai pedoman untuk bersikap yang baik dalam bermasyarakat. Moral juga merupakan pendidikan akademik dan non-akademik, yang artinya adalah seperti apa perilaku yang baik lalu di terapkan ke kehidupan dalam bermasyarakat. Banyak anak anak zaman sekarang tidak memiliki norma-norma dan moral yang baik. Contohnya saja, saat guru atau dosen yang sedang menjelaskan tentang materi tetapi para peserta didik tidak memperhatikan apa yang di jelaskan oleh guru atau dosen. Yang artinya adalah peserta didik kurang dalam bermoral yang baik kepada guru atau dosen. Itulah mengapa nilai-nilai Pancasila harus di wujudkan agar terlaksananya norma-norma moral dan etika secara baik.⁵

Dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat dua faktor yang diperlukan. Yaitu, faktor kontekstual (internal) dan faktor struktural (eksternal). Faktor kontekstual berkaitan dengan konsep-konsep materi baik itu materi sejarah atau tradisi, geografi, sosial politik, ekonomi dan isu global. Dalam hal factor structural dimana berkaitan dengan institusi atau Lembaga tempat melaksanakan proses Pendidikan tersebut yaitu dari sisi tanggun jawab isntitusi, penentuan nilai dan regulasi pendanaan.⁶

⁴ Evi Maylitha, Dini Anggaraeni Dewi, *Memposisikan Kembali Nilai Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 5, Nomor 1, 2021, Hlm. 3-4.

⁵ Prof. DR. Hamid Darmadi, M.Pd., *APA MENGAPA BAGAIMANA Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKN) Konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa*, (Jakarta, AnImage, 2020, Hlm. 16.

⁶ David Kerr, "Citizenship Education In The Curriculum: An International Review", *The School Field*, Vol.10 No.3/4 (1999), 7-8.

Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan kuantitas pelaksanaan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat dilihat dari pencapaian kriteria-kriteria Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Kriteria dapat dilihat dari sisi kriteria minimal dan juga kriteria maksimal dalam pencapaian Pendidikan kewarganegaraan suatu negara. Kriteria minimal dicirikan, *thin, exclusive, elitist, civic education, formal, content led, knowledge based, didactic transmission, easier to achieve and measure in practice*. Sedangkan, kriteria maksimal dicirikan, *thick, inclusive, activist, citizenship education, participative, process led, values based, interactive interpretation, more difficult to achieve and measure in practice*.⁷

Berdasarkan hal di atas maka dalam tulisan ini dapat dideskripsikan secara rinci tinjauan kewarganegaraan baik itu dari sisi faktor, kriteria dan aspek dalam kewarganegaraan. Diharapkan hal ini dapat menjadi bahan tinjauan baik secara teoritis maupun praktis dalam kewarganegaraan suatu negara, bangsa dan masyarakat.

B. FAKTOR KONTEKSTUAL DAN STRUKTURAL DALAM TINJAUAN KEWARGANEGARAAN

1. Faktor Kontekstual

Pertama, sejarah dan tradisi bahwa sejarah merupakan faktor terpenting dalam pendidikan kewarganegaraan, karena dengan mempelajari sejarah dapat mengetahui kondisi suatu bangsa pada masa lalu. Dengan mempelajari sejarah, juga dapat membandingkan masa lalu suatu bangsa dengan masa sekarang. Dan sejarah mengajarkan bahwa kegagalan-kegagalan yang ada pada masa lalu yang diperbuat oleh bangsa dapat diantisipasi pada masa sekarang agar tidak terulang kembali. Tidak hanya kegagalan, keberhasilan pada masa lalu juga dapat

⁷ Ibid

diadaptasikan pada masa sekarang dan masa depan untuk suatu bangsa. Karena keberhasilan maupun kegagalan merupakan hal yang lumrah pada kehidupan. Sejarah merupakan identitas dan cerminan jati diri dari suatu bangsa.⁸ Tradisi dan budaya suatu bangsa sangat berhubungan erat dengan beberapa hal, misalnya bangsa Indonesia memiliki tradisi dan budaya gotong royong. Gotong royong merupakan rasa tanggung jawab bersama bagi seluruh anggota masyarakat maupun komunitas sebagai satu kesatuan. Gotong royong tidak hanya menolong orang lain yang sedang kesulitan, tetapi gotong royong mengandung hal yang positif oleh dan untuk seluruh komunitas.⁹ Baik buruk suatu bangsa dapat dilihat oleh tradisi dan budayanya. Tradisi yang baik akan membuat bangsa tersebut menjadi berkembang dan maju. Sedangkan jika tradisi pada suatu bangsa buruk, akan membawa bangsa tersebut ke kemunduran.

Kedua, geografi dimana geografi merupakan ilmu yang mempelajari ilmu-ilmu sosial serta mempelajari perbedaan maupun persamaan permukaan bumi diambil dari sudut pandang wilayah serta lingkungan dalam artian fisis dan sosial.¹⁰ Luasnya wilayah geografi suatu bangsa menyebabkan bahasa, budaya, etnis, ras, dan agama yang berbeda-beda. Pendidikan kewarganegaraan harus mempelajari karakter-karakter masyarakat pada suatu bangsa agar menumbuhkan rasa toleransi dalam bermasyarakat. Dewasa ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh berbedanya ras dan etnis pada suatu bangsa. Hingga mengakibatkan tumpah darah pada perbedaan tersebut. Sebenarnya hal-hal semacam itu dapat dihindari dengan cara menanamkan pendidikan kewarganegaraan mulai sejak dini pada suatu bangsa. Menjelaskan bahwa perbedaan dalam suatu bangsa merupakan

⁸ S. Hamid Hasan, "Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter", Paramita: *Jurnal Studi Sejarah*, Vol.22 No.1 (2012), 87-88.

⁹ Jeane S. Mintz, *Muhammad, Marx, Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia*. ter. Zuhilmiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 13-15.

¹⁰ Dede Sugandi, "Pembelajaran Geografi sebagai Salah Satu Dasar Pembentukan Karakter Bangsa", *Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.8 No.2 (2015), 245.

hal yang biasa, sehingga dapat membentuk masyarakat dengan karakter yang saling toleransi. Berbeda bukan berarti bermusuhan. Pendidikan kewarganegaraan harus menjelaskan bahwa dengan suatu perbedaan, bangsa akan menjadi lebih indah dan hidup.

Suatu bangsa dibentuk dari kewilayahannya. Berbicara mengenai wilayah, banyak sekali kasus perebutan wilayah antar suku-suku. Ambil contoh Israel dan Palestina. Pada sekitar tahun 1200SM bangsa Yahudi yang tinggal di perbukitan sekitaran laut mati diserang oleh orang Philistine (sekarang berubah nama menjadi Palestina) untuk memperluas wilayah kekuasaan Philistine. Akan tetapi orang Philistine dipukul mundur oleh kaum Yahudi sampai mendesak mereka ke daerah tepi pantai yang sempit.¹¹ Dari kisah tersebut menunjukkan bahwa perebutan suatu wilayah sudah terjadi dari zaman dahulu. Contoh kasus perebutan wilayah di Indonesia adalah kelompok OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Pendidikan kewarganegaraan harus menanamkan rasa cinta tanah air agar kasus-kasus seperti itu tidak terjadi.

Ketiga, sosial politik yang mana dalam bidang sosial politik, suatu pemerintahan dituntut untuk ambil peran dalam melindungi rakyatnya dalam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Dan pemerintah juga harus mengupayakan memberi pendidikan kepada setiap rakyat dengan fasilitas yang memadai.¹² Pendidikan kewarganegaraan sendiri berperan untuk menjelaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang dapat diperoleh oleh warga negara. Setiap warga negara juga harus mengambil peran sosial pada lingkungannya. Pemerintah juga wajib mengendalikan sistem kapitalisme agar ekonomi pada warga tidak dirugikan.

¹¹ Wang Xiang Jun, *Mengapa Bangsa Yahudi Cerdas dan Anda Tidak?* (Yogyakarta: Pustaka Solomon, 2009), 19-20.

¹² Muten Nuna, Roy Marthen Moonti, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.4 No.2 (2019), 118.

Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk menjaga kestabilan politik. Biasanya politik tidak stabil disebabkan oleh sosial dan ekonomi, seperti yang terjadi pada revolusi Uni Soviet tahun 1905-1907. Masyarakat melakukan pemogokan besar-besaran dan baru pertama terjadi di muka bumi. Pemogokan ekonomi berubah pemogokan politik, dan pemogokan politik berubah pemberontakan.¹³ Penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi kaum borjuis dan kaum proletar. Masyarakat yang tertindas akan sadar, dan menyerang balik kaum penindas dengan cara revolusi. Pendidikan kewarganegaraan harus memberikan pemahaman-pemahaman mengenai politik kepada warga negara, agar dapat menjadi politik yang demokratis dan adil. Disamping itu, pemerintahlah yang mempunyai kendali paling besar dalam menjaga kestabilan politik. Pemerintah harus bersikap adil pada warganya untuk mengurangi kaum-kaum oposisi bermunculan.

Keempat, ekonomi dimana tingkat ekonomi suatu negara bukan hanya terbentuk dari sumber daya alam, tetapi pengelolaan sumber daya manusia juga menjadi suatu kualitas bagi pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemajuan negara diukur dari pertumbuhan ekonominya, apakah termasuk negara berkembang atau negara maju.¹⁴ Ekonomi merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu negara. Untuk mewujudkan ekonomi yang baik, maka pemerintah harus memanfaatkan SDA yang tersedia, dan meningkatkan kualitas SDM. Tidak hanya ekonomi yang baik, tetapi ekonomi juga harus berkeadilan. Jangan sampai pasar-pasar dikuasai oleh orang-orang kapitalis rakus, dan UMKM mengalami kebangkrutan akibat kalahnya modal dengan si kapitalis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan jarak antara si kaya dengan si miskin semakin tinggi. Peran pendidikan kewarganegaraan dalam bidang ekonomi adalah

¹³ Vladimir Illyich Lenin, *Komunisme Sayap Kiri: Suatu Penyakit Kanak-Kanak* (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1953), 12.

¹⁴ Sutrisno Asyafiq, "Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol.28 No.1 (2019), 18-19.

memberi pengetahuan mengenai finansial pada setiap masyarakat. Peran tersebut harus dibantu oleh pemerintah dengan cara memberi pelatihan atau keterampilan pada masyarakat agar dapat hidup mandiri.

Ekonomi saat ini dikuasai oleh kaum kapitalis, kepemilikan alat produksi diambil alih oleh mereka. Kaum proletar hanya bisa menjual tenaga kerjanya pada kapitalis, yang menyebabkan mereka sangat ketergantungan dengan kapitalis. Mereka bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹⁵ Sistem ekonomi seperti itulah yang membuat suatu bangsa bisa hancur. Tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa hampir semua negara menganut sistem kapitalisme. Sistem yang dimana menghisap tenaga-tenaga kaum proletar, sistem yang memiliki modal besar dialah yang akan berkuasa. Kaum kapitalis memanfaatkan tenaga kerja kaum proletar untuk mempertahankan *status quo* mereka. Tipu muslihat para kapitalis dengan cara menaikkan gaji kaum proletar, sehingga kaum proletar merasa dihargai kinerjanya dan mereka tidak melakukan revolusi. Pendidikan kewarganegaraan harus menjelaskan kepada kaum proletar bagaimana perputaran uang itu terjadi, agar mereka tidak menjadi kaum terhisap. Keawaman masyarakatlah yang membuat ekonomi dunia menjadi kapitalis seperti saat ini.

Kelima, isu global yang merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas dipendidikan kewarganegaraan. Isu global membahas hal-hal yang trend mengenai perkembangan dunia, baik itu politik, ekonomi maupun sosial. Isu global saat ini adalah kemungkinan akan terjadinya resesi pada tahun 2023 nanti. Resesi tersebut disebabkan oleh kasus covid-19 yang belum juga berakhir dan disebabkan oleh perang antar Russia dan Ukraina. Kendati demikian, kita harus mengantisipasi jika terjadinya resesi pada tahun 2023. Pemerintah seharusnya memaparkan data-data mengenai resesi 2023, menyiapkan upaya-upaya untuk

¹⁵ David Smith, Phil Evans, *Das Kapital Untuk Pemula*. ter. Ugoran Prasad (Yogyakarta: Resist Book, 2004), 89-91.

menghadapinya, dan mensosialisasikan hal tersebut agar masyarakat tidak terkejut lagi jika itu terjadi.

Banyak sekali negara yang sangat khawatir dengan resesi 2023 yang menyebabkan negaranya menjadi depresi. Resesi hal yang lumrah terjadi dan tidak dapat dicegah, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi dampaknya.¹⁶ Pada kasus covid-19 lalu, masyarakat Indonesia sangat sigap dalam mempertahankan ekonominya agar tidak masuk ke jurang resesi. Masyarakat membeli produk-produk UMKM sebagai upaya untuk membantu masyarakat lain menjaga kelangsungan hidup di masa pandemi.¹⁷

Peran pendidikan kewarganegaraan pada isu global sebagai sarana pendekatan terhadap masyarakat, bahwa isu global sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Masyarakat sebaiknya tidak mengabaikan isu-isu global, karena dampak dari isu global adalah seluruh bangsa-bangsa yang ada di bumi. Masyarakat harus bijak menanggapi isu global, tidak berlebihan dan tidak juga apatis.

2. Faktor Struktural

Pertama, tanggungjawab institusi dimana institusi bertanggung jawab atas pemahaman masyarakat terhadap pendidikan kewarganegaraan, baik itu dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga pendidikan. Kebanyakan pendidikan kewarganegaraan hanya diberikan secara teori, sehingga kurangnya dukungan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat kewarganegaraan. Para generasi muda penerus bangsa seakan acuh pada pendidikan kewarganegaraan, karena kurangnya pengetahuan mereka dibidang tersebut.¹⁸ Pendidikan

¹⁶ Bachtiar Hassan Miraza, "Seputar Resesi dan Depresi", *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol.30 No.2 (2019), 11-12.

¹⁷ Selena Riri Blandina, Alvin Noor Fitrian, Wulan Septiyani, "Strategi menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa pandemi", *Efektor*, Vol.7 No.2 (2020), 185.

¹⁸ Maskarto Lucky Nara Rosmadi, "Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, Vol.2 No.2 (2018), 132-133.

kewarganegaraan lebih jauh lagi harus memberikan pendidikan moral dan karakter, agar generasi muda memiliki moral yang baik dan rasa cinta tanah air. Pemerintah juga diharapkan bekerja sama dengan organisasi-organisasi kepemudaan untuk menanamkan pendidikan kewarganegaraan pada kader-kader mereka.

Di Jerman ketika Adolf Hitler berkuasa, ia menanamkan pendidikan kewarganegaraan secara doktrin dalam ideologi fasis pada anak-anak. Ketika berusia 14 tahun diajarkan menambak dan menjalankan perang-perangan gaya militer. Para diktator fasis tidak tertarik pada pendidikan. Kaum fasis berpikir bahwa mengajar anak-anak untuk menemukan jati diri adalah berbahaya dan buang-buang waktu. Mereka lebih menasar secara fisik dan moral.¹⁹ Pendidikan kewarganegaraan secara doktrin pada pemerintahan fasis sangat berbahaya. Anak muda menolak ideologi-ideologi lain, dan lebih mengagungkan ideologinya. Walaupun tujuan mereka baik, untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Tetapi dengan kurangnya pemahaman dengan ideologi lain mereka akan menjadi orang-orang yang intoleran.

Kedua, penentuan nilai dimana sebagai warga negara, nilai-nilai ditentukan oleh negara. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan menanamkan nilai, norma, dan moral yang dianggap baik oleh masyarakat dan bangsa. Masyarakat harus sadar akan norma-norma yang berlaku, dan rasa cinta terhadap tanah air dapat tumbuh. Pendidikan kewarganegaraan juga diharapkan menerapkan pendidikan untuk menyelesaikan konflik. Membina masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di lingkungan setempat.²⁰ Baik buruk suatu nilai merupakan hal subjektif, tetapi ada nilai-nilai objektif yang dianggap buruk bagi bangsa. Ketika seseorang melakukan nilai-nilai yang buruk pada lingkungan sosial, hendaknya ia dikenakan sanksi, baik sanksi

¹⁹ Hugh Purchel, *Fasisme* (Yogyakarta: Resist Book, 2015), 63-65

²⁰ Bunyamin Maftuh, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan", *Jurnal Educationist*, Vol.2 No.2 (2008), 137.

hukum maupun sanksi moral. Yang patut dihindari adalah amukan masa, karena perbuatan tersebut tidak berprilaku manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Sebaiknya jika ada yang melanggar nilai-nilai yang telah ditentukan, langsung menyerahkannya kepada pihak yang berwajib.

Kutipan yang sesuai bahwa “Anda dapat membujuk orang Afghanistan untuk masuk neraka, tetapi tidak dapat memaksa dia untuk masuk ke surga”, kalimat tersebut merupakan pepatah Afghanistan yang sangat terkenal yang mendeskripsikan karakter bangsa Afghanistan. Bangsa Afghanistan tidak akan pernah tunduk pada bangsa asing, dari Uni Soviet sampai Amerika Serikat.²¹ Penentuan nilai-nilai yang kuat pada suatu bangsa akan menjadi karakter pada bangsa tersebut. Bangsa Afghanistan menolak nilai-nilai yang dianut oleh barat, karena mereka telah mempunyai nilai-nilai sendiri. Pendidikan kewarganegaraan harus menanamkan nilai-nilai baik seperti bangsa Afghanistan, nilai-nilai yang mengakar ke dalam diri dan tidak tergoyahkan.

Ketiga, regulasi pendanaan yang baik dalam Pendidikan bahwa sebagaimana tertuang dalam PP No.48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Dana dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan dapat mempengaruhi kualitas sebuah pendidikan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama menyediakan dana pendidikan yang terbaik. Sekolah sebagai sarana pendidikan pastinya membutuhkan dana untuk biaya operasionalnya.²² Institusi pendidikan sebaiknya menyediakan anggaran khusus untuk pendidikan kewarganegaraan. Metode pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya teori-teori saja, tetapi harus ada praktek

²¹ Ahmad Dumayathi Bashori, *Osama Bin Laden Melawan Amerika* (Bandung: Mizan, 2001), 77.

²² Badrut Tamam, “Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol.29 No.2 (2018), 37.

dilingkungan masyarakat. Untuk merapkan hal tersebut tentunya harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi sekolah dan membutuhkan dana yang optimal.

Melimpahnya dana tidak menjadi tolok ukur, pendidikan tersebut baik atau buruk. Tetapi dengan mengelola dana secara benar dan akurat, pendidikan tersebut akan berjalan dengan baik.²³ Selain dari pemerintah, dana dalam pendidikan juga dapat bersumber dari masyarakat dan orangtua murid. Dana dari masyarakat dapat berupa sumbangan pendidikan, zakat, hibah, wakaf, dll. Sedangkan dana dari orangtua bisa berupa iuran uang sekolah maupun uang bangunan. Dana harus dikelola dengan bijak, jangan sampai ada oknum-oknum yang melakukan penyelewengan terhadap dana pendidikan. Karena banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan pihak sekolah terhadap dana pendidikan. Penyelewengan seperti itu yang mengakibatkan buruknya pendidikan di Indonesia. Pemerintah harus disiplin mengecek keluar masuknya dana pada institusi pendidikan.

C. KRITERIA KEWARGANEGARAAN: MINIMAL DAN MAKSIMAL

1. Kriteria Minimal Kewarganegaraan

Pertama, *thin* - tipis yang dimaksudkan disini adalah awalan atau dasarnya kita belajar kewarganegaraan, seperti halnya saat masih PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kita sudah diajarkan cinta tanah air sendiri dengan diajarkannya menanam pohon, mengenakan pakaian tradisional saat hari-hari nasional, adanya kegiatan lomba yang diikuti anak usia dini di hari kemerdekaan, dan banyak lagi hal yang sudah menjadi bukti adanya pelajaran kewarganegaraan dari sejak awal kita masuk sekolah. Adapun pelajaran kewarganegaraan yang dari saat kita masih kecil belum masuk sekolah manapun dan berada dilingkungan keluarga adalah

²³ Nur Komariah, "Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan", *Jurnal Al-Afkar*, Vol.6 No.1 (2018), 68.

menghormati orang tua dan membantu orang tua, tanpa kita sadari hal sekecil dan setipis itu merupakan halnya kita cinta tanah air.

Kedua, *exlusive* - eksklusif juga bermakna khusus, tidak tergabung dengan yang lainnya, atau bisa juga terpisah sendiri dari yang lainnya. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia merupakan hal khusus untuk orang-orang yang berada didalam negara Indonesia. Orang di negara Singapura atau negara lainnya juga mendapatkan pendidikan kewarganegaraan mereka tersendiri secara khusus untuk para rakyatnya didalam negara itu. Makanya pendidikan kewarganegaraan sangat penting berada di suatu negara untuk membuat masyarakat atau rakyat di negara menjadi tahu tentang hak dan kewajibannya di dalam negara tersendiri. Hanya berada didalam lingkupan negara sendiri.

Ketiga, *elitist* - elitis kata ini sedikit asing di dengar. Elitis bermakna terpilih, atau bisa juga terpandang. Dalam makna ini kita bisa mengartikan lebih dalam tentang maksudnya elitis. Pendidikan terpilih untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Negara kita, negara Indonesia membuat pembelajaran kewarganegaraan sejak kecil untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjadikan kita rakyat yang cinta kepada pancasila yang merupakan pilar ideologi negara indonesia. Seperti sekarang dari SD (Sekolah Dasar) hingga kuliah masih adanya pelajaran kewarganegaraan, adapun beberapa pelajaran yang diterapkan yang paling umum adalah menaati aturan lampu lalu lintas, gotong royong bersama, dan hal lainnya yang dapat dilakukan.

Keempat, *civic education* - Pendidikan Kewarganegaraan disini lebih mendalami secara sempit bagaimana proses pendidikan kewarganegaraan dalam negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan biasanya mulai mengajarkan kepada PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dimana anak-anak diajarkan dengan mengikuti lomba hari kemerdekaan berupa 'masuk kelereng dalam botol' dan beberapa lomba lainnya. Tidak itu saja anak-anak pada usia dini sudah biasa menggunakan baju-baju adat dari daerahnya sendiri. Beranjak ke SD (Sekolah Dasar) siswa sudah bisa menerapkan pancasila ke kehidupan sehari-hari, menyangkut aspek

dalam sila-sila yang berada di pancasil. Pada saat SMP (Sekolah Menengah Pertama) siswa yang berada ditingkat ini mempelajari hak dan kewajiban masyarakat dalam suatu bangsa. Saat SMA (Sekolah Menengah Atas) mengajarkan kepada siswa tentang terapan perilaku yang berada di pasal-pasal UUD RI 45(Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945). Dan kemungkinan ada yang melanjutkan pendidikan kewarganegaraan untuk jejang yang lebih tinggi lainnya.

Kelima, *formal - resmi* dimana dalam negara Indonesia pendidikan Kewarganegaraan merupakan hal yang resmi atau ditetapkan untuk semua rakyat Indonesia, karena sudah ketentuan dari negara semua rakyat Indonesia setidaknya mengetahui apa saja haknya yang berada didalam negara agak tidak terjadinya kesalahpahaman, seperti hak warisan seseorang, hak dalam berpendapat, ataupun hak yang lainnya. Dan kewajiban rakyat yang berada didalam negara wajib diketahui karena wajib dilakukan, seperti kewajiban kepada orang tua, guru, dan lainnya. Berbagai hal yang perlu dilakukan dalam suatu bangsa agar bangsa atau negara tersebut tidak runtuh dan tetap teratur.

Keenam, *content led* - materi sebagai tujuan bahwa dalam proses yang sempit ini konten di pimpin yang dilakukan adalah menggunakan pendidikan karakter yang diajarkan guru, dosen, atau media lainnya. Banyak yang bisa dipelajari dalam bimbingan guru atau lainnya untuk berkarakter dilingkungan sekolah ataupun tempat khusus lainnya. Pendidikan karakter sangat penting dan berhubungan dengan jelas dalam pembelajaran kewarganegaraan, hubungan salah satunya diantara pendidikan karakter dan pembelajaran kewarganegaraan adalah kepribadian yang dibentuk dalam sekolah seperti salah satunya gotong royong, kerja bakti, dan banyak lagi. Itulah contoh hal hubungan keduanya dalam pendidikan kewarganegaraan juga.

Ketujuh, *knowledge based* - berbasis pengetahuan bahwa pengetahuan sangat penting dalam kehidupan. Makanya kita belajar dari semua orang dan dari semua sekolah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Dalam hal berbasis pengetahuan kewarganegaraan

merupakan proses yang dilakukan oleh kita sekarang yaitu dengan membaca berbagai buku, artikel ataupun jurnal yang telah diterbitkan agar menambahkan pengetahuan. Agar bisa mendapatkan simpulan dari apa yang kita baca dan bisa diterapkan pada kehidupan kita. Membuat kita lebih bijak dalam membuat keputusan dengan penalaran tajam kita, seperti berpikir kritis di situasi kritis. Membuat pemikiran dengan fakta yang telah tersedia, itulah pengetahuan berbasis kewarganegaraan.

Kedelapan, *didactic transmission* – transmisi didaktik merupakan metode kedisiplinan yang dilakukan pendidik ke peserta didik. Kedisiplinan yang dilakukan ini adalah metode agar dapat mengetahui bagaimana kinerja pengajar, apa yang didapatkan oleh peserta didik dari kedisiplinan yang diterapkan oleh pengajar dapat mempengaruhi kepribadian dari peserta didik. Dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan harus menerapkan kedisiplinan agar menjadi model untuk semua pendidikan lainnya. Dari pendidikan kewarganegaraan dapat kita ketahui bagaimana bersikap disiplin dan berada di kesila berapa kedisiplinan itu, dan hal ini sudah diajarkan saat kita mulai duduk di bangku sekolah. Seperti, datang tepat waktu ke sekolah, berdiri dengan rapi saat upacara bendera, atau bisa juga diam saat pengajar sedang menjelaskan materi di depan kelas, dan banyak lagi hal lainnya yang sudah diterapkan diproseskan di kehidupan sehari-hari.

Kesembilan, *Easier to achieve and measure in practice* – Lebih mudah untuk mencapai dan mengukur dengan praktek dimana pencapaian dalam pendidikan kewarganegaraan dapat lebih mudah dipahami karena biasanya menyangkut langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini biasanya disebabkan dengan adanya proses yang telah dilalui, kita dapat memahami sesuatu dengan cepat bila kita sudah mengalami pengalaman dari hal tersebut. Bisa juga pendidikan kewarganegaraan lebih mudah untuk mencapai karena menyangkut dalam diri kita sendiri dan tentang pemahaman kita yang lebih cepat mengerti, membuat kita mudah mencapai kewarganegaraan. Bisa juga ini menyangkut ke dalam pikiran kritis yang telah kita buat sehingga dapat

lebih mudah untuk mencapai. Mengerti atau tidaknya tanpa sadar kita telah melakukan pendidikan kewarganegaraan dalam lingkupan terkhusus atau tertentu, seperti melakukan langsung sila-sila yang berada di pancasila, dalam sila pertama kita harus percaya dengan agama yang kita imankan dan juga melakukan toleransi terhadap yang berbeda agama, sila kedua yang mengutamakan keadilan dan keprimusiaan kita terhadap sesasam manusia, sila ketiga yang mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan suku dengan berbagai aspek perbedaan lainnya, sila keempat mengajarkan tetap bekerja sama seperti gotong royong bersama dan hal bersama lainnya, dan sila kelima yang mengajarkan keadilan negara untuk rakyat bisa dilihat tidak adanya pembedaan kaya dan miskinnya dalam belajar di sekolah.

2. Kriteria Maksimal Kewarganegaraan

Pertama, *thick* - tebal, dalam pendidikan kewarganegaraan memberitahukan kita tentang awalan dasar materi yang kita dapatkan, berbeda dengan tipis dibagian minimal yang lebih menuju ke proses, tebal dalam maksimal ini lebih menuju kedalam aspek materi yang kita pelajari dari SD (Sekolah Dasar) berupa pembelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) tentang sila kesatu hingga sila kelima, tentang kemoralan, dan hal lainnya lagi. Hal ini didasari dengan materi yang telah menjadi umum untuk semua siswa yang berada di negara Inonesia dengan sistem yang menerapkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan.

Kedua, *inclusive* - inklusif dimana dalam pendidikan kewarganegaraan tentu saja itu salah satu promosi untuk mengajak kita masuk kedalam dunia kewarganegaraan agar menjadi warga negara yang baik. Termasuk dan terhitung merupakan makna lain dari inklusif, ini memberi maksud tentang bagaimana pembelajaran kewarganegaraan ingin mengajak kita menjadi rakyat yang teratur. Dalam hal materi, inklusif memaknai dengan tidak membeda-bedakan pendapat seseorang, dalam pendidikan kewarganegaraan disana kita diajarkan untuk

menerima dulu apapun keputusan bersama walaupun ingin menolak, walaupun menolak atau menyanggah bisa dengan berbicara perlahan, dengan mendapatkan materi seperti ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, *activist* - aktivis merupakan hal yang digerakan perorangan atau berkelompok, dalam hal ini yang menyangkut-pautkan aktivis dengan materi dalam pendidikan kewarganegaraan adalah dunia politik yang biasanya mengajak kerjasama dalam pemilihan presiden, dalam pembelajaran kewarganegaraan SMA (Sekolah Menengah Atas) peserta didik yang dapat mengetahui organisasi yang dipimpin bersama dan perorangan salah satu contohnya adalah partai-partai yang berada di dalam Indonesia. Pergerakan ini bertujuan dalam penggalangan dana, menjadi masyarakat yang baik dan peduli, dan juga hal lainnya.

Keempat, *citizenship education* - Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan disini adalah pendidikan secara luas yang diajarkan dalam bentuk materi dari dunia luar. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bisa dilakukan dalam lingkungan khusus tetapi bisa juga dengan mengetahui dari masyarakat luas, seperti halnya kita mengetahui berita yang terjadi diberbagai negara termasuk negara kita yang memiliki ragam masalah. Hal ini bisa menjadi pembelajaran materi tersendiri untuk kita, kadang kita juga bisa menemukan permasalahan dalam sebuah koran yang sering kita baca ataupun, pendidikan ini juga dapat kita pelajari dari suatu radio. Awal dari semuanya sebelum adanya televisi yang menampilkan berita terdapat radio dan koran sebagai berita kemenangan kita merebutkan kemerdekaan.

Kelima, *participative* - partisipatif bahwa mengikuti suatu hal yang telah kita pelajari dari lingkungan luas, partisipatif dalam mendengarkan materi yang disampaikan dalam seminar kewarganegaraan itu juga merupakan salah satu partisipatif yang banyak diketahui. Dalam hal partisipatif kewarganegaraan kita bisa turut berperan dalam berbagai kegiatan yang menjerumuskan kita kejalan yang baik dalam kewarganegaraan. Partisipatif ini juga memiliki banyak manfaat dan

tujuan yang berguna untuk kita yang hidup dengan negara yang demokratis ini agar bisa bertahan hidup, contohnya adalah berpartisipasi dalam pembelajaran di sekolah.

Keenam, *process led* – proses sebagai tujuan dimana bertujuan untuk membangun karakter peserta didik dengan proses yang cukup panjang bisa kita lihat dari pembelajaran 12 tahun yang terjadi dari SD (Sekolah Dasar) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas) dan itu belum terhitung pendidikan yang terjadi saat setelah SMA (Sekolah Menengah Atas). Proses ini lah yang menjadi hal yang terpenting dalam segala aspek termasuk pendidikan kewarganegaraan ini. Jika proses terbentuknya karakter pada peserta didik berhasil, ini juga menjadi keberhasilan bagi pengajar karena dapat membuat peserta didik menjadi masyarakat yang berguna dalam bangsa. Makanya proses ini penting.

Ketujuh, *values based* – berbasis nilai bahwa aspek nilai sangat penting dalam hal kriteria maksimal hal pendidikan kewarganegaraan. Segala sesuatu materi yang telah kita dapatkan akan di uji dan diberi nilai. Tetapi penilaian ini tidak hanya terjadi pada ujian, karena bisa saja pada penilaian secara langsung ilmu kewarganegaraan yang telah kita dapatkan. Hal ini dapat di lihat dari tingkah laku kita dalam bermasyarakat luas. Bisa tidaknya kita menaati aturan berlalu lintas dan berbagai materi lainnya yang dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. penilaian ini sangat penting dan biasanya penilaian juga bisa terjadi dadakan contohnya ketika dirazia.

Kedelapan *interactive interpretation* – interpretasi interaktif merupakan pendapat yang saling bergantung satu sama lain yang didapatkan dari kesan. Kewarganegaraan tentu pilihan yang bagus dalam pendidikan, didalam pendidikan ini kita bebas memberikan berbagai suara dan berdebat hingga pendapat kita dimenangkan pun tidak masalah, seperti hal dalam melakukan rapat yang diadakan ketu RT (Rukun Tetangga). Pendapat salah satu hal yang mengharuskan kita berpikir kritis, karena dengan pemikiran kritis kita dapat mengajukan pendapat kita dengan yakin karena berdasarkan fakta dan juga dapat

menyelesaikan permasalahan musyawarah, tapi kadang juga membuat keadaan menjadi kacau karena kita terlalu banyak mengeluarkan pendapat lit.

Kesembilan, *more difficult to achieve and measure in practice* - diukur dalam praktek dan lebih sulit dicapai dimana terjadinya berbasis lebih sulit dicapai adalah karena kadang peserta didik yang terlalu malas melakukan pendidikan kewarganegaraan, membuat pendidik kebingungan apa yang harus mereka lakukan agar peserta didik semangat kembali dalam pembelajaran, terutama didalam pendidikan kewarganegaraan. Biasanya metode yang dilakukan pendidik kepada peserta didik adalah menghafal materi. Penghapalan materi memang kadang membuat kita mengingat pembelajaran dalam pendidikan kewarganegaraan tetapi juga bisa cepat lupa, dan kadang tidak mengerti materi apa yang dihapalkan. Hal ini yang membuat berbasis lebih sulit dicapai. Adapun metode yang hanya mengingatkan kata kunci saja, tetapi ini jarang bisa masuk kedalam pikiran peserta didik karena pastinya mereka hanya mengingat kata kunci bukan isi dari kata kunci tersebut, dengan kata lain peserta didik tidak memahami materi.

Pengukuran tingkah laku dari materi yang telah kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan, dapat diukur dalam praktek yang kita lakukan dalam sehari-hari. Melakukan materi kewajiban berupa menghormati orang tua itu merupaj tolak ukur dari hasil pembelajaran kita dalam pendidikan kewarganegaraan. Adapun hak yang harus kita ambil adalah hak asasi manusia kita, manusia berhak hidup bebas dari kekangan, contohnya tidak ada pembullian dalam lingkungan masyarakat luas maupun sekolah. Tingkah laku kita yang telah dipelajari dari pendidikan kewarganegaraan dapat diukur dalam praktek kehidupan sehari-hari.

D. ASPEK KEWARGANEGARAAN

1. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum merupakan pengembangan yang diaplikasikan untuk merangkum dari tujuan pendidikan dan menjadi pemegang dalam manifestasi pembelajaran pada semua macam interpretasi jenjang pendidikan. Kurikulum juga harus bersifat seimbang dengan pandangan hidup dan validasi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang memmanifestasikan falsafah yang di tentukan oleh sistem kurikulum bilamana terjadi perubahan sistem ketatanegaraan, maka berimbas juga pada perubahan sistem pemerintah dan pendidikan, bahkan kurikulum yang orisinal.

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang, ilmu pengetahuan dalam pendidikan sangatlah penting, dan oleh sebab itu pemerintah selalu melakukan sistematisasi dalam kurikulum atau materi aplikasi pendidikan dengan berpusat cepat dan sejalan dalam aktivitas kerja serta determinasi substansi masyarakat yang inkompatibel secara berkepanjangan.²⁴

Civic education juga di percaya secara konseptual memiliki sifat multidimensional yaitu aspek epistemologis, metode penelitian dan pengembangannya yang menjadikan dalam suatu paradigma yang utuh. Oleh karenanya *civic education* dapat di terima sebagai wahana sistematis dalam tataran konseptual pendidikan disiplin ilmu. Layaknya di disiplin ilmu yang telah matang, maka memiliki aspek-aspek yaitu antologi, epistemologi dan aksiologi yang artinya objek dari kajian *civic education* pada hakikatnya adalah perilaku warga negara yang bersifat secara multidimensional.²⁵

2. Pendekatan pembelajaran kewarganegaran

Pendekatan dapat di artikan sebagai sudut pandang seseorang dalam proses pembelajaran yang mengacu pada proses yang bersifat

²⁴ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Hlm.8

²⁵ Dr. Winarno, S. Pd., M.Si., *Pembelajaran PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Isi, Strategis, dan Penilaian*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013), hal. 13.

secara umum. Dan di dalamnya mewadahi cakupan teoretis tertentu. Dalam sasaran pembelajaran ini di harapkan dapat menumbuhkan ide sainstifik setelah peserta didik bersangkutan dengan lingkungan atau peristiwa yang ada di sekitarnya. Dan untuk menumbuhkan makna dari pemerosesan pembelajaran tersebut, yang erat kaitannya dengan peserta didik. Kualitas dari pembelajaran juga dapat di lihat seberapa luas pengembangan pembelajaran dapat mempengaruhi tingkah laku pada setiap individu atau peserta didik.

Berikut beberapa pendekatan yang tepat dalam kewarganegaraan yang bersifat nilai dan moral:

a. Evokasi

Dalam pendekatan ini di tekankan bahwasanya pada inisiatif setiap peserta didik dapat mengepresikan atau mengaplikasikan diri secara impulsif yang di dasari pada previlese dan kesempatan. Pendekatan semacam ini sangat baik, namun dapat di perhatikan dari budaya masyarakat ini bisa di katakan jauh dari kehidupan kota di mana dalam melaksanakan pendekatan tersebut tentunya memiliki banyak sekali rintangan dalam menghadapi kendala dalam aspek cultural maupun psikologis. Agar dapat menerapkan pendekatan tersebut, yang harus di lakukan oleh pengajar adalah *breaking the ice* atau menyatakan dirinya , menyatakan apa yang ada dalam pikiran mereka dan dapat mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka. Sehingga dalam tempo berikutnya peserta didik dapat berbuat yang sama akan hal tersebut. Penyusaian nilai yang ada dalam pancasila sebagai tujuan kewarganegaraan yang merupakan tindakan yang sangat penting dalam metode pembelajaran nilai.

b. Penalaran moral

Dalam penalaran ini adalah di mana siswa di kaitkan dalam suatu moral dengan begitu keputusan yang mereka ambil dapat memberikan alasan yang berkesinambungan. Dalam pengajaran kewarganegaraan setiap peserta didik dapat merasakan dan larut dalam suasana yang

sengaja di manifestasikan untuk mendorong peserta didik dalam menggunakan rasio dan perasaan terhadap kejadian.

c. Pendekatan analisis penilain

Dalam hal ini peserta didik di ajak untuk menganalisis nilai terhadap suatu media bagaimana seorang pengajar mengajarkan dalam pendidikan moral dan norma-norma yang ada di sekolah. Dalam pendekatan ini di harapkan peserta didik dapat menilai sesuatu yang baik atau buruk. Dan dalam pendekatan ini juga dapat membuat peserta didik dalam berpikir secara kritis berdasarkan moral dan norma-norma.²⁶

3. Spesialisasi Pendidik Dalam Pembelajaran Kewarganegaraan

Sebagai seorang pendidik tentunya harus mempunyai kapasitas dan pengetahuan yang cukup dalam melakukan pembimbingan kepada peserta didik untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat motivasi dalam belajar. Serta para pengajar memiliki kepribadian yang berbudi luhur dan demokratis. Dengan begitu dapat di ketahui bahwa banyak tantangan dalam menjadi seorang pengajar/pendidik. Seorang pendidik juga diwajibkan untuk memiliki keahlian khusus dalam membuat suasana kelas menjadi menyenangkan agar para peserta didik tidak akan merasa kebosanan selama berada di dalam kelas. Dan dari hal tersebut dapat di simpulkan bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik perlu memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi.²⁷

4. Buku Teks Atau Sumber Lainnya

Buku teks dalam pembelajaran kewarganegaraan sangatlah penting bagi peserta didik untuk memahami karakteristik kewarganegaraan itu seperti apa, dan bagaimana aspek-aspek kewarganegaraan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dalam buku teks yang di pelajari juga harus menjelaskan secara terperinci

²⁶ Trirhayu, *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, Vol 2, Nomor 2, 2016, hlm. 2-4

²⁷ Dr. Khusnul Wardan, M, Pd., *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta, Grup Penerbit CV BUDI UTAMI, 2019), Hlm. 14.

tentang kewarganegaraan dan di buat semenarik mungkin sehingga peserta didik tertarik untuk membacanya. Di era globalisasi sekarang ini banyak orang yang memanfaatkan media teknologi untuk mencari informasi, bahkan mungkin teknologi lebih mencakup banyak aspek di bandingkan buku teks. Dalam upaya ini dapat menyebabkan penurunan budaya membaca di kalangan anak muda jaman sekarang. Untuk memahami nilai-nilai Pancasila buku teks harus mempunyai wadah yang memumpuni agar para peserta didik tidak terkecoh akan perubahan globalisasi di era saat ini. Buku teks juga harus di tulis dengan semangat agar dapat memberdayakan nilai-nilai Pancasila. Karena generasi muda saat ini memiliki peran yang besar dalam memajukan bangsa dan negara maka seharusnya pemerintah pusat dapat menciptakan kondisi agar lebih kondusif agar terciptanya ide-ide secara teoretis dan kreatif. Sama halnya dengan buku teks, para pengembang ide harus bisa menciptakan buku-buku yang baik dalam nilai-nilai Pancasila sehingga pemuda di zaman sekarang ini memiliki value tentang pengembangan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut.²⁸

Adapun sumber lainnya adalah dengan mengikuti organisasi yang bersifat bela negara dan nilai-nilai Pancasila. Dengan mengikuti sebuah organisasi peserta didik juga akan dapat menambah wawasan yang sebelumnya mereka tidak tau menjadi tau karena mengikuti sebuah organisasi. Dalam organisasi memang sangat berpengaruh dalam kepribadian peserta didik bagaimana mereka berpikir secara logika dan mempunyai value yang luas. Selain mengikuti organisasi sumber lain yang dapat di ketahuai akan nilai-nilai Pancasila adalah dari masyarakat sekitar peserta didik di harapkan mampu untuk mengamati setiap kepribadian akan karakter bela negara di masyarakat sekitar. Hal ini di karenakan berkurangnya rasa bela negara di masyarakat sekitar. Karena lunturnya akan pemahaman Pancasila banyak masyarakat yang minim

²⁸Prisca Kiki Wulandari, Destriana Saraswati, Surya Desismansyah Eka Putra, *MEMBANGUN INDONESIA: PEMBERDAYAAN PEMUDA BERWAWASAN PANCASILA*, (Malang, UB Press, 2017), Hlm. 10.

akan etika dan moral dan lebih mementingkan diri sendiri atau individualis. Dan jika di lihat dari kehidupan masyarakat ini banyak yang mendahulukan kepentingan diri sendiri di bandingkan dengan bela negara. Oleh karenanya di harapkan anak zaman sekarang harus lebih mengutamakan bela negara di bandingkan dengan kepentingan sendiri, maka dapat di simpulkan bahwa nilai-nilai akan Pancasila sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

5. Penilaian yang Tepat

Di era masa kini generasi pendidikan yang ada di Indonesia mulai mengalami kemunduran karena implementasi nilai-nilai khususnya adalah kewarganegaraan. Tentunya karena penyebab ini cukup memprihatinkan akan pendidikan anak negeri. Apalagi dalam bermoral dan tingkah laku dapat di katakan jauh dari nilai-nilai yang ada di dalam isi Pancasila. Isi yang ada di dalam Pancasila tersebut merupakan perwujudan dari karakter bangsa yang bermoral dan sebagai jati diri negara. Berikut penjelasan penilaian yang tepat dalam kewarganegaraan:

- a. Religius: suatu perilaku yang taat dalam ajaran agama yang dianut, dan membiasakan hidup rukun antar sesama.
- b. Disiplin: perilaku yang mencerminkan sikap taat, patuh dan tertib akan peraturan yang telah di tetapkan.
- c. Demokrasi: sikap akan berpikir secara kritis dan bertindak sesuai peraturan.
- d. Cinta akan tanah air: sikap yang menunjukkan peduli akan negeri ini.
- e. Peduli antar sesama: dalam hal ini adalah sikap bagaimana seseorang peduli antar sesama dan lingkungan sekitar.

Di era reformasi pada saat ini demokrasi peserta didik akan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan mencerminkan penilaian

²⁹ Adri Patton, Gazali Salim, Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro, Budi Pramono, Agus Indarjo, Siti Hartinah, D.S, Julian Rangsangan, Aris Irawan, Rukisah Saleh, Mufrida Zein, Kun Retno Handayani, Sutrisno Anggoro, Abdul Muis Prasetya, Wempi Faber, *STRATEGI PERTAHANAN MELALUI OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR PERBATASAN*, (Aceh, Syiah Kuala Universty Press, 2021), Hlm. 28.

yang tepat dalam materi kewarganegaraan karena yang di siplin dan patuh tentunya memiliki demokratis yang tinggi. Namun yang perlu di sadari adalah untuk menumbuhkan dan menanamkan hal tersebut harus memiliki kepatuhan akan nilai-nilai hukum yang berlaku. Maka penilain dalam kewarganegaraan akan terlaksana jika para peserta didik atau muda-mudi memiliki kepribadian yang demokratis dan luhur.³⁰

6. Pengembangan Masa Kini/Masa Depan

Media sosial atau media elektronik di zaman globalisasi saat ini tidak dapat terlepas dari anak muda di zaman sekarang. Hampir 24 jam media social selalu menjadi pusat perhatian di kalangan kaum muda mudi. Arus globalisasi yang semakin hari semakin berkembang dapat mengalami kemunduran dalam budaya karakter bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang tau akan karakter bangsa seharusnya dapat mengembangkan kepribadian yang berakhlak. Dan pengembangan kewarganegaraan harus di ajarkan sejak dini untuk menumbuhkan karakteristik warga negara yang baik dalam karakter bangsa. Di harapkan pendidikan karakter tersebut dapat di terapkan, serta dengan bantuan orang tua, guru dan orang yang ada di sekitar. Untuk penanaman nilai dan moral di harapkan dapat membantu terlaksananya pendidikan kewarganegaraan yang cerdas dan berwawasan luas, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi secara baik di era globalisasi pada saat ini dan di harapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme anak di zaman sekarang. Dan di harapkan juga dapat memberikan pandangan tentang pentingnya pendidikan karakter dalam pendidikan formal maupun non-formal.³¹

³⁰ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *ILMU DAN APLIKASI PENDIDIKAN*, (Bandung, PT IMTIMA, 2007), Hlm. 153.

³¹ Aida Atika, Yoga Saputra, *Bangga Menjadi Guru Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Untuk Pembentukan Karakter Di era Generasi Z*, (Antologi Essai Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), (Yogyakarta, UAD Press, 2021), Hlm. 32

E. PENUTUP

Pendidikan Kewarganegaraan dapat dinyatakan sebagai upaya dalam proses pendidikan karena memiliki aspek-aspek yang luas berhubungan dengan masalah politik ataupun pemerintahan dalam pengembangan warga negara. Dalam penguatan perencanaan yang baik dalam kewarganegaraan tentunya harus didukung oleh berbagai hal baik itu dari sisi kriteria, aspek dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari sisi kurikulum dimana kurikulum juga harus bersifat aktif dalam mendukung tercapainya kompetensi kewarganegaraan, yang artinya kurikulum dapat menyongsong perubahan yang selaras dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang baik dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan dapat di lakukan dengan cara saintifik. Beragam aspek yang ada di dalam nilai Pancasila harus di wujudkan dengan norma-norma dan etika. Norma-norma tersebut di jadikan sebagai pedoman untuk bersikap yang baik dalam bermasyarakat. Moral juga merupakan pendidikan akademik dan non-akademik, yang artinya adalah seperti apa perilaku yang baik lalu di terapkan ke kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam pendidikan kewarganegaraan, terdapat dua faktor yang diperlukan. Yaitu, faktor kontekstual (internal) dan faktor struktural (eksternal). Faktor kontekstual berkaitan dengan konsep-konsep materi. Dalam hal faktor struktural dimana berkaitan dengan institusi atau Lembaga tempat melaksanakan proses Pendidikan. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan kuantitas pelaksanaan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat dilihat dari pencapaian kriteria-kriteria Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Kriteria dapat dilihat dari sisi kriteria minimal dan juga kriteria maksimal dalam pencapaian Pendidikan kewarganegaraan suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyafiq, S. 2019. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan ilmu sosial*, 28 (1), 18-30.
- Atika Aida, Yoga Saputra. 2021. *Bangga Menjadi Guru Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Untuk Pembentukan Karakter Di era Generasi Z*, Antologi Essai Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Yogyakarta: UAD Press.
- Bashori, A.D. 2001. *Osama Bin Laden Melawan Amerika*. Bandung: Mizan.
- Blandina, S.R., Fitriani, A.N., Septiyani, W. 2020. Strategi menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa pandemi. *Efektor*, 7 (2), 181-190.
- Darmadi Hamid. 2020 APA MENGAPA BAGAIMANA Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKN) Konsep Dasar Strategi Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa. Jakarta: AnImage.
- Darman Regia Ade. 2021. *Telaah Kurikulum*. Jakarta: Guepedia.
- Fauzi, Fadil yudia, Arianto, Ismail, Solihatin, Etin. "Peran Guru Pendidikan pacasila Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik" *Jurnal PPKN UNJ Online.Voumel 1. Nomor 2. 2013*.
- Hasan, S.H. 2012. Pendidikan Sejarah Untuk Memperkuat Pendidikan Karakter. Paramita: *Jurnal Studi Sejarah*, 22 (1), 81-95.
- Jun, Wang Xiang. 2009. *Mengapa Bangsa Yahudi Cerdas dan Anda Tidak?*. Yogyakarta: Pustaka Solomon.
- Kerr, D. 1999. Citizenship Education in The Curriculum: An International Review. *The School Field*, 10 (3/4), 5-32.
- Komariah, N. 2018. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan, *Jurnal Al-Afkar*, 6 (1), 68-94.
- Lenin, V.I. 1953. *Komunisme Sayap Kiri: Suatu Penyakit Kanak-Kanak*. Jakarta: Yayasan Pembaharuan.
- Lubis Maulana Arafat. 2020. *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN) DI SD/MI: Peluang Dan Tantangan di Era Industri 4.0*. Jakarta: KENCANA.
- Maftuh, B. 2008. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, 2 (2), 134-144.
- Maylitha Evi. Dini Anggaraeni Dewi. 2021. *Memposisikan Kembali Nilai Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*". Volume 5, Nomor 1.
- Mintz, J.S. 2002. *Muhammad, Marx, Marhaen: Akar Sosialisme Indonesia*. ter. Zuhilmiyasri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miraza, B.H. 2019. Seputar Resesi dan Depresi. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 30 (2), 11-13.
- Mulyasa, E. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nuna, M. & Moonti, R.M. 2019. Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*. 4 (2), 110-127
- Patto, Adri, Gazali Salim, Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro, Budi Pramono, Agus Indarjo, Siti Hartinah, D.S, Julian Rangsangan, Aris Irawan, Rukisah Saleh, Mufrida Zein, Kun Retno Handayani, Sutrisno Anggoro, Abdul Muis Prasetia, Wempi Faber. 2021 *STRATEGI PERTAHANAN MELALUI OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR PERBATASAN*. Aceh: Syiah Kuala Universty Press.
- Purchel, H. 2015. *Fasisme*. Yogyakarta: Resist Book.
- Rosmadi, M.L.N. 2018. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn dan Sosial Budaya*, 2 (2), 129-135.
- Smith, D. & Evans, P. 2004. *Das Kapital Untuk Pemula*. ter. Ugoran Prasad. Yogyakarta: Resist Book.
- Sugandi, D. 2015. Pembelajaran Geografi sebagai Salah Satu Dasar Pembentukan Karakter Bangsa. *Sosiohumanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, 8 (2), 241-252.
- Tamam, B. 2018. Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 29 (2), 36-48.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan. 2007. FIP-UPI, *ILMU DAN APLIKASI PENDIDIKAN*, Bandung: PT IMTIMA.
- Tri Rahayu. 2016. "*Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*". Vol 2. Nomor 2.
- Wardan Khusnul. 2019. *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV BUDI UTAMI.
- Winarno. 2013. *Pembelajaran PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Isi, Strategis, dan Penilaian*. Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Wulandari Prisca Kiki, Destriana Saraswati, Surya Desismansyah Eka Putra. 2017. *MEMBANGUN INDONESIA: PEMBERDAYAAN PEMUDA BERWAWASAN PANCASILA*. Malang: UB Press.